



PANDUAN EVALUASI KINERJA TPID TAHUN 2020 (AWARD 2021)

Disampaikan pada Panduan Evaluasi Kinerja TPID Tahun 2020 (Award 2021)
Kamis, 4 Maret 2021

Kategori TPID Award 2021

Berdasarkan evaluasi kinerja TPID tahun 2020





Apabila diperlukan pendalaman atas dokumen laporan yang disampaikan oleh TPID, Pokja Daerah TPIP dapat melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dan sarana lainnya.

Penilaian 2019

Kegiatan	Kriteria	Nilai
High Level Meeting	Rapat dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir.	9
	Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir.	3
Rakor Provinsi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota)	Rapat dipimpin Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir.	9
	Rapat dipimpin Sekda Provinsi, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir.	3
Rakor Kabupaten/Kota (diinisiasi oleh kab/kota untuk berkoordinasi dengan kab/kota lainnya dalam lingkup satu provinsi)	Rapat dipimpin Kepala Daerah, dihadiri oleh perwakilan TPID kab/kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir.	9
	Rapat dipimpin Sekda Kab/Kota, dihadiri oleh perwakilan TPID Kab/Kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan daftar hadir.	3
Kegiatan capacity building untuk TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: Workshop, Sosialisasi, Studi banding yang dibuktikan dengan laporan kegiatan atau dokumen pendukung lainnya	6

Penilaian 2020

Kegiatan	Kriteria	Nilai
High Level Meeting (rapat koordinasi TPID dan/atau antar TPID)	Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur (untuk TPID Provinsi) dan Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati (untuk TPID Kabupaten/Kota) serta dibuktikan dengan risalah rapat dan bukti hadir	9
	Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Sekda serta dibuktikan dengan risalah rapat dan bukti hadir	5
Rapat Koordinasi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota)	Rapat yang diinisiasi oleh TPID Provinsi dan dipimpin Gubernur/Wakil Gubernur, dihadiri oleh perwakilan TPID Kab/Kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan bukti hadir	9
	Rapat yang diinisiasi oleh TPID Provinsi dan dipimpin Sekda, dihadiri oleh perwakilan TPID Kab/Kota serta dibuktikan dengan risalah rapat dan bukti hadir	5
	Rapat yang dihadiri Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati (Ketua TPID Kab/Kota) serta dibuktikan dengan risalah rapat dan bukti hadir	3
Kegiatan capacity building untuk TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: Workshop dan Studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang disertai laporan pelaksanaan kegiatan. - Untuk internal TPID - Jumlah maksimal kegiatan capacity building 6 kali dalam 1 tahun penilaian	6

Pengenalan Aspek Proses (2)

Penilaian 2019

KOMPONEN KEBIJAKAN

Kegiatan	Kriteria	Nilai
Pelaksanaan Kebijakan	Penyusunan peraturan pelaksanaan yg berkaitan dgn pengendalian inflasi daerah (SK Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah, SE tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama AntarDaerah, dll).	10
	Surat Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasar rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau hasil inisiatif Kepala Daerah.	



Penilaian 2020

Kegiatan	Kriteria	Nilai
Pelaksanaan Kebijakan	Kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tsb adalah hasil koordinasi TPID	10
	Penerbitan peraturan pelaksanaan yg berkaitan dgn pengendalian inflasi daerah (SK Gubernur/Walikota/Bupati, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati, SE tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama AntarDaerah, dll).	8
	Surat Gubernur/Walikota/Bupati/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasar rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau hasil inisiatif Kepala Daerah.	4

KOMPONEN AKUNTABILITAS

Kegiatan	Kriteria	Nilai
Laporan TPID	Sebagaimana diatur dalam Keppres No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional & Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.	5



Kegiatan	Kriteria	Nilai
Laporan TPID	Sebagaimana diatur dalam Keppres No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional & Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.	25

Aspek Output

KRITERIA DAN RENTANG NILAI PROGRAM UNGGULAN

Penilaian 2019

	Kriteria Penilaian Program Unggulan					Total Nilai
	Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antardaerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	Pemanfaatan teknologi*	
Rentang Score	1-15	0-30	0-20	1-35	0-10	2 - 110

*) Program unggulan mencerminkan optimalisasi teknologi dalam mendukung berkembangnya ekosistem pertanian terintegrasi hulu hilir.

Penilaian 2020

	Kriteria Penilaian Program Unggulan					Total Nilai
	Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antardaerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	Pemanfaatan teknologi*	
Rentang Score	0-15	0-25	0-15	0-35	0-10	100

*) pemanfaatan teknologi dapat berupa teknologi pertanian maupun teknologi informasi dalam mendukung sisi hulu dan hilir

Penilaian 2020

	Komponen Pengukuran	Kriteria/Rumus	Keterangan
1	Realisasi inflasi		
	a. Dibandingkan data historis	<p>Nilai Aspek Realisasi Inflasi = $100 - (At - Xk)$</p> <p>At : Aktual inflasi daerah (yoy) pada Desember 2020 Xk : Rata-rata inflasi yoy 3 tahun terakhir dengan menggunakan data rata-rata bulanan (yoy) periode Januari 2018 – Desember 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi: Menggunakan data realisasi inflasi provinsi (yoy) per bulan yang dirilis BPS atau merupakan pembobotan dari kota sampel inflasi di provinsi bersangkutan. • Kab/Kota IHK: Menggunakan data realisasi inflasi kabupaten/kota yang dirilis BPS; Khusus untuk Kabupaten/Kota IHK yang baru diperhitungkan sebagai kota sample inflasi oleh BPS pada Survei Biaya Hidup 2018, Xk menggunakan rata-rata inflasi (yoy) 2 (dua) tahun terakhir.
	b. Dibandingkan sasaran inflasi nasional	<p>Nilai Aspek Realisasi Inflasi = $100 - [At - Sn]$</p> <p>At : Aktual inflasi daerah Sn : Nilai tengah sasaran inflasi nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)</p> <p>*) khusus untuk realisasi inflasi (At) lebih besar dari 4% memperoleh nilai mutlak 85</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi: Menggunakan data realisasi inflasi (yoy) yang dirilis oleh BPS atau merupakan pembobotan dari kota sampel inflasi di provinsi bersangkutan. • Kab/Kota IHK: Menggunakan data realisasi inflasi (yoy) yang dirilis oleh BPS
2	Volatilitas inflasi	<p>Nilai Aspek Volatilitas Inflasi = $100 - (SDt)$</p> $SDt = \sqrt{\frac{\sum(x_t - \bar{x}_t)^2}{n}}$ <p>SDt : Standar deviasi inflasi aktual bulanan (mtm) kota Xt : Inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi Xt : Rata-rata inflasi aktual bulanan (mtm) provinsi n : Jumlah sampel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi: Menggunakan data realisasi inflasi provinsi bulanan (mtm) yang dirilis BPS atau merupakan pembobotan dari kota sampel inflasi di provinsi bersangkutan. • Kab/Kota IHK: Menggunakan data realisasi (yoy) yang dirilis oleh BPS

Mengunggah ke situs
<http://tpin.id>

Mengirimkan
**email ke pokja daerah
TPIP**

Online

Mengirimkan
**dokumen hardcopy ke
Pokja Daerah TPIP**

Offline



Mengunggah (*upload*) Formulir beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs **<https://tpin.id/>**.

Mengirimkan ke email Pokja Daerah TPIP: **pokjadaerahtpip@gmail.com**, Dengan subject : Dokumen Penilaian TPID Tahun XXXX (Provinsi/Kabupaten/Kota ...).

Mengirimkan dokumen *hardcopy* melalui pos ke alamat:

Pokja Daerah TPIP di kantor Direktorat Sinkronisasi UPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Ditjen BANGDA) Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750.

Formulir *Self Assessment* dan Ringkasan Program Unggulan

Formulir *Self Assessment* Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah | FORMULIR KEGIATAN TPID TERBAIK KABUPATEN/KOTA 2020

Kabupaten/Kota :

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan (a)	Jumlah Kegiatan /Laporan (b)	Bobot (c)	Total (a) x (b) x (c)
High Level Meeting (rapat koordinasi TPID dan/atau antar TPID)	• Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/ Wakil Bupati serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat dan bukti hadir</u> .	9			
	• Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Sekda serta dibuktikan dengan risalah rapat dan bukti hadir.	5			
Rakor Provinsi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota)	• Rapat yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati atau Ketua TPID Kab/Kota serta dibuktikan dengan <u>laporan rapat dan bukti hadir</u> .	3		5%	
Kegiatan capacity building kepada TPID yang diinisiasi oleh TPID yang bersangkutan	Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> dan/atau Studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang disertai bukti yang cukup, termasuk laporan pelaksanaan kegiatan.	6			
Pelaksanaan kebijakan di daerah	• Kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah hasil koordinasi TPID.	10		10%	
	• Penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah (SK Walikota/Bupati, Peraturan Walikota/Bupati, SE tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerja sama Antardaerah, dll).	8			
	• Surat Walikota/Bupati/Sekretaris Daerah kepada K/L atau pihak terkait lainnya berdasar rekomendasi kebijakan hasil pertemuan TPID atau hasil inisiatif Walikota/Bupati.	4			
Laporan TPID	• Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Permenko Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.	25		5%	

Keterangan: Total nilai memperhatikan maksimum total nilai per komponen

Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2020 (maksimal 2 halaman)

Kabupaten/Kota :

Nama Program Kerja:	
Latar belakang pelaksanaan program kerja :	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan pemilihan program Tahapan yang dilakukan
Implementasi program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Kerja sama yang dilakukan, baik dengan instansi vertikal/horizontal, atau dengan stakeholders/pihak swasta Sumber biaya (APBD/Hibah/CSR perusahaan) Jumlah biaya yang dianggarkan/direalisasikan Rincian pelaksanaan program Pemanfaatan teknologi yang mendukung sisi hulu dan hilir pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi
Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Dampak jangka pendek dan/atau panjang terhadap perkembangan harga/realisasi inflasi
Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi implementasi Tantangan yang dihadapi